

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**



**Kementerian Pertanian
Badan Karantina Pertanian
Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang**

Jl. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air, Padang, Sumatera Barat
Telp/Fax : 0751 62560, Email : bkp_kls1_padang@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akutansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akutansi	8
(1) Pendapatan – LRA	8
(2) Pendapatan – LO	8
(3) Belanja	9
(4) Beban	9
(5) Aset	9
a. Aset Lancar	9
b. Aset Tetap	10
c. Penyusutan Aset Tetap	11
d. Piutang Jangka Panjang	11
e. Aset Lainnya	12
(6) Kewajiban	12
(7) Ekuitas	12
(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali	13
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1 Pendapatan	14
B.2 Belanja	15

B.2.1	Belanja Pegawai	16
B.2.2	Belanja Barang	17
B.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18
B.2.5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1	Aset Lancar	21
C.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	20
C.1.2	Persediaan	20
C.2	Aset Tetap	21
C.2.1	Tanah	21
C.2.2	Peralatan dan Mesin	22
C.2.3	Gedung dan Bangunan	23
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24
C.2.5	Aset Tetap Lainnya	25
C.2.6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
C.3	Aset Lainnya	25
C.3.1	Aset Lain-lain	25
C.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	26
C.4	Kewajiban Jangka Pendek	26
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.5	Ekuitas	27
C.5.1	Ekuitas	27
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28
D.2	Beban Pegawai	28
D.3	Beban Persediaan	29
D.4	Beban Barang dan Jasa	30
D.5	Beban Pemeliharaan	31
D.6	Beban Perjalanan Dinas	31
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	32
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	33
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
E.1	Ekuitas Awal	33

E.2	Surplus/Defisit-LO	33
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	34
E.4.1	Selisih Revaluasi Aset Tetap	34
E.4.2	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	34
E.5	Transaksi Antar Entitas	34
E.6	Ekuitas Akhir	35
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	36
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2	Pengungkapan Lain-lain	36

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.382.302.101,00 atau mencapai 138,12% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.000.831.000,00.

Realisasi Belanja Negara (netto) pada TA 2017 adalah sebesar Rp 7.239.051.750,00 atau mencapai 99,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp 7.296.429.000,00.

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 26.407.515.526,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 223.304.356,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 26.184.211.170,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 17.148.804,00 dan Rp 26.390.366.722,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.376.097.062,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 7.579.259.398,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -6.203.162.336,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp 1.624.167,00 dan Defisit Rp 453.381,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -6.202.708.955,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 19.496.586.896,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -6.202.708.955,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 3.665.742.282,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 9.430.746.499,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 26.390.366.722,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.000.831.000,00	1.382.302.101,00	138,12	799.230.005,00
Jumlah Pendapatan		1.000.831.000,00	1.382.302.101,00	138,12	799.230.005,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	3.821.677.000,00	3.799.836.691,00	99,43	3.731.047.849,00
Belanja Barang	B.2.2	3.087.052.000,00	3.055.694.999,00	98,98	3.943.671.534,00
Jumlah Belanja Operasi		6.908.729.000,00	6.855.531.690,00	99,23	7.674.719.383,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	377.700.000,00	373.520.700,00	98,89	663.419.875,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	0	0	0,00	1.030.450.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	10.000.000,00	9.999.360,00	99,99	70.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		387.700.000,00	383.520.060,00	98,92	1.763.869.875,00
Jumlah Belanja		7.296.429.000,00	7.239.051.750,00	99,21	9.438.589.258,00

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	2.156.460,00	8.361.499,00
Persediaan	C.1.2	221.147.896,00	121.161.670,00
Jumlah Aset Lancar		223.304.356,00	129.523.169,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	11.437.873.000,00	5.973.385.550,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.578.034.139,00	8.194.263.439,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	12.758.272.100,00	12.710.265.865,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.211.265.300,00	1.225.457.440,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.505.700,00	2.505.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-7.322.108.474,00	-6.841.091.650,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-321.267.911,00	-1.726.242.427,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-160.362.684,00	-133.035.953,00
Jumlah Aset Tetap		26.184.211.170,00	19.405.507.964,00
Jumlah Aset		26.407.515.526,00	19.535.031.133,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	17.148.804,00	38.444.237,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.148.804,00	38.444.237,00
Jumlah Kewajiban		17.148.804,00	38.444.237,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	26.390.366.722,00	19.496.586.896,00
Jumlah Ekuitas		26.390.366.722,00	19.496.586.896,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		26.407.515.526,00	19.535.031.133,00

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.376.097.062,00	802.448.675,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.376.097.062,00	802.448.675,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.777.814.179,00	3.661.530.461,00
Beban Persediaan	D.3	288.656.905,00	434.432.931,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.258.678.697,00	1.281.205.032,00
Beban Pemeliharaan	D.5	658.859.000,00	681.520.200,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	761.884.381,00	1.584.499.200,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	833.366.236,00	798.849.457,00
JUMLAH BEBAN		7.579.259.398,00	8.442.037.281,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.203.162.336,00	-7.639.588.606,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	1.825.665.050,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	1.624.167,00	64.481.825,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	-1.170.786,00	110.359.680,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		453.381,00	-1.871.542.905,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-6.202.708.955,00	-9.511.131.511,00

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	19.496.586.896,00	20.505.612.145,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-6.202.708.955,00	-9.511.131.511,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	3.665.742.282,00	-142.441.491,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00	-142.441.491,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.2	3.665.742.282	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	9.430.746.499,00	8.644.547.753,00
EKUITAS AKHIR		26.390.366.722,00	19.496.586.896,00

Padang, Januari 2018
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	831.000,00	831.000,00
Pendapatan Jasa	480.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	480.831.000,00	1.000.831.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.739.323.000,00	3.821.677.000,00
Belanja Barang	2.867.764.000,00	3.087.052.000,00
Belanja Modal	347.950.000,00	387.700.000,00
Jumlah Belanja	5.955.037.000,00	7.296.429.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.382.302.101,00 atau mencapai 138,12% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.831.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	831.000,00	792.450,00	95,36
Pendapatan Jasa	1.000.000.000,00	1.381.509.651,00	138,15
Jumlah	1.000.831.000,00	1.382.302.101,00	138,12

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 72,95 % dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	792.450,00	831.000,00	-4,64
Pendapatan Jasa	1.381.509.651,00	794.330.755,00	73,92
Pendapatan Lain-lain	0	4.068.250,00	-100,00
Jumlah	1.382.302.101,00	799.230.005,00	72,95

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja (netto) pada TA 2017 adalah sebesar Rp 7.239.051.750,00 atau 99,21% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.296.429.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		3.821.677.000,00	3.802.736.935,00	99,50
Belanja Barang		3.087.052.000,00	3.055.694.999,00	98,98
Belanja Modal		387.700.000,00	383.520.060,00	98,92
Total Belanja Kotor		7.296.429.000,00	7.241.951.994,00	99,25
Pengembalian Belanja			2.900.244	0,00
Total Belanja		7.296.429.000,00	7.239.051.750,00	99,21

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017			
	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		7.296.429.000,00	7.241.951.994,00	99,25
Total Belanja Kotor		7.296.429.000,00	7.241.951.994,00	99,25
Pengembalian Belanja			2.900.244	0.00
Total Belanja		7.296.429.000,00	7.239.051.750,00	99,21

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -23,30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan dikarenakan penghematan anggaran sehingga berkurangnya pengadaan sarana dan prasarana.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	3.799.836.691,00	3.731.047.849,00	1,84
Belanja Barang	3.055.694.999,00	3.943.671.534,00	-22,52
Belanja Modal	383.520.060,00	1.763.869.875,00	-78,26
Total Belanja	7.239.051.750,00	9.438.589.258,00	-23,30

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.799.836.691,00 dan Rp 3.731.047.849,00. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,84% dari TA 2016. Hal ini disebabkan kenaikan tunjangan suami/istri, anak, jabatan fungsional tertentu, beras dan lembur.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.161.976.935,00	3.229.119.117,00	-2,08
Belanja Lembur	640.760.000,00	506.344.000,00	26,55
Jumlah Belanja Kotor	3.802.736.935,00	3.735.463.117,00	1,80
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.900.244	-4.415.268,00	-34,31
Jumlah Belanja	3.799.836.691,00	3.731.047.849,00	1,84

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.055.694.999,00 dan Rp3.943.671.534,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -22,52% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Realisasi belanja barang operasional, non operasional, persediaan, pemeliharaan dan perjalanan dalam negeri terjadi penurunan dikarenakan berkurangnya pagu anggaran dari tahun yang lalu dan penghematan anggaran.
2. Realisasi belanja jasa terjadi kenaikan dikarenakan pembayaran langganan internet di Wilker Bandara Minangkabau yang digunakan untuk pelayanan operasional karantina;

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	750.169.867,00	829.454.599,00	-9,56
Belanja Barang Non Operasional	101.710.000,00	131.794.000,00	-22,83
Belanja Barang Persediaan	377.000.000,00	420.780.000,00	-10,40
Belanja Jasa	406.071.751,00	309.348.735,00	31,27
Belanja Pemeliharaan	658.859.000,00	667.795.000,00	-1,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	761.884.381,00	1.584.499.200,00	-51,92
Jumlah Belanja Kotor	3.055.694.999,00	3.943.671.534,00	-22,52
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.055.694.999,00	3.943.671.534,00	-22,52

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 373.520.700,00 dan Rp 663.419.875,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -43,70% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh penghematan anggaran. Peruntukan penggunaan belanja modal peralatan dan mesin untuk sarana pelayanan operasional karantina.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.520.700,00	663.419.875,00	-43,70
Jumlah Belanja Kotor	373.520.700,00	663.419.875,00	-43,70
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	373.520.700,00	663.419.875,00	-43,70

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.030.450.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -100% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh penghematan anggaran. Peruntukan penggunaan belanja modal gedung dan bangunan untuk prasarana penunjang pelayanan karantina.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.030.450.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	1.030.450.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	1.030.450.000,00	-100,00

B.2.5 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 9.999.360,00 dan Rp 70.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar -85,72% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan dikarenakan penghematan anggaran. Peruntukan penggunaan untuk peningkatan pelayanan karantina.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.999.360,00	70.000.000,00	-85,72
Jumlah Belanja Kotor	9.999.360,00	70.000.000,00	-85,72
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	9.999.360,00	70.000.000,00	-85,72

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.156.460,00 dan Rp 8.361.499,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	2.156.460,00	8.361.499,00
Jumlah	2.156.460,00	8.361.499,00

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 221.147.896,00 dan Rp 121.161.670,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	221.147.896,00	121.161.670,00
Jumlah	121.161.670,00	121.161.670,00

Mutasi persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 :

Saldo TA 2016 audited	121.161.670
Mutasi Tambah :	388.643.131
- Pembelian	377.000.000
- Transfer Masuk	11.189.750
- Koreksi Penyesuaian	453.381
Mutasi Kurang :	288.656.905
- Pemakaian	288.656.905
Saldo Per 31 Desember 2017	221.147.896

Saldo TA 2016 audited sama dengan nilai audited yang sudah diperiksa KPKNL dan KPPN.

Penambahan

- Pembelian menggunakan MAK 521811 (Belanja barang konsumsi) untuk peningkatan pelayanan operasional karantina.
- Transfer masuk berupa penerimaan dokumen utama karantina dari sekretariat Badan Karantina Pertanian
- Koreksi Penyesuaian dari selisih dari nilai pembelian.

Pengurangan

- Pemakaian berupa pemakaian ATK, bahan lab dan dokumen utama untuk pelayanan operasional karantina.

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 11.437.873,00 dan Rp 5.973.385.550,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	5.973.385.550,00
Mutasi Tambah	
Hibah Langsung	261.040.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.203.447.450,00
Saldo per 31 Desember 2017	11.437.873.000,00

Mutasi tambah

1. Hibah langsung sesuai dengan BAST nomor : 030/61/BAST/BAP2BMD-III/2017 tanggal 17 April 2017 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kementerian Pertanian Nomor : 1595/PL.130/A/04/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia memutuskan Hibah Langsung aset tanah 1.004,00 M2 dengan no sertifikat hak pakai nomor 14 Tahun Perolehan 2013 yang beralamat Olo Bangau, Batang Anai sebesar Rp. 261.040.000,00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	324,00m ²	Sutan Syahrir Rt.01/01, Padang Selatan	103.680.000,00
2.	1.070,00m ²	Jl. Banda Cina Rt.--, Batang Anai	143.137.550,00
3.	935,00m ²	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	168.300.000,00
4.	1.385,00m ²	Sutan Syahrir Rt.-, Padang Selatan	4.038.268.000,00
5.	19.000,00m ²	Jl. Pasir Jambak Rt.03/VII, Koto Tengah	1.520.000.000,00
6.	1.004,00m ²	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	261.040.000,00
Jumlah			6.234.425.550,00

2. Selisih Revaluasi Aset Tetap (KPKNL Padang) sebesar Rp 5.203.447.450,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 8.578.034.139,00 dan Rp 8.194.263.439,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	8.194.263.439,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	373.520.700,00
Transfer Masuk	10.250.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	8.578.034.139,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-7.322.108.474,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.255.925.665,00

Mutasi tambah yaitu :

1. Pembelian merupakan pengadaan 3 unit personal komputer, 2 unit printer dot matrix, 3 unit printer laser jet, 3 unit laptop, 1 paket CCTV, 3 buah single micropipette, 1 buah microplate shaker, 1 buah digital stirrer hotplate, 1 unit autoclave portable analog, 1 buah termohigrometer, 1 buah analytical balance, 1 unit waterbath, 2 unit moisture counter meter (pengukuran kadar air kayu), 1 unit moisture counter meter (pengukuran kadar air biji - bijian), 2 unit timbangan digital, 2 unit alat penghancur buah/sayuran/daging, 1 unit mesin potong rumput (gendong), 6 unit AC split, 7 unit tabung pemadam api.
2. Transfer masuk merupakan penerimaan dokumen utama karantina dari sekretariat Badan Karantina Pertanian.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 12.758.272.100,00 dan Rp 12.710.265.865,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	12.710.265.865,00
Mutasi Tambah	
Hibah (Masuk)	3.294.592.100,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-1.533.733.915,00
Revaluasi Aset Tetap	-1.712.851.950,00
Saldo per 31 Desember 2017	12.758.272.100,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-321.267.911,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	12.437.004.189,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan hibah langsung sesuai dengan BAST nomor : 030/61/BAST/BAP2BMD-III/2017 tanggal 17 April 2017 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kementerian Pertanian Nomor : 1595/PL.130/A/04/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia memutuskan Hibah Langsung Gedung dan Bangunan Kantor 410,00 M2 dengan no sertifikat hak pakai nomor 14 Tahun Perolehan 2016 yang beralamat Olo Bangau, Batang Anai sebesar Rp. 3.294.592.100,00.
2. Mutasi Kurang adalah Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp - 1.533.733.915,00 dan Revaluasi Aset Tetap Rp – 1.712.851.950,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.211.265.300,00 dan Rp 1.225.457.440,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.225.457.440,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	9.999.360,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-3.971.253,00
Uraian Transaksi Tidak Ada	-20.220.247,00
Saldo per 31 Desember 2017	1.211.265.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-160.362.684,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.050.902.616,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Mutasi tambah merupakan pembelian jaringan berupa pemasangan jaringan internet di gedung kantor Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional Minangkabau.
2. Mutasi Kurang adalah Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp -3.971.253,00 dan Revaluasi Aset Tetap Rp -20.220.247,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.505.700,00 dan Rp 2.505.700,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp -7.803.739.069,00 dan Rp -8.700.370.030,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	11.437.873.000,00	0,00	11.437.873.000,00
	Peralatan dan Mesin	8.578.034.139,00	-7.322.108.474,00	1.255.925.665,00
2.	Gedung dan Bangunan	12.758.272.100,00	-321.267.911,00	12.437.004.189,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.211.265.300,00	-160.362.684,00	1.050.902.616,00
4.	Aset Tetap Lainnya	2.505.700,00	0	2.505.700,00
	Akumulasi Penyusutan	33.987.950.239,00	-7.803.739.069,00	26.184.211.170,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 38.454.000,00 dan Rp 38.454.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp -38.454.000,00 dan Rp -38.454.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	38.454.000,00	-38.454.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		38.454.000,00	-38.454.000,00	0,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 17.148.804,00 dan Rp 38.444.237,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.333.488,00	23.356.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.815.316,00	15.088.237,00
Jumlah	17.148.804,00	38.444.237,00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar adalah rapel kekurangan kenaikan pangkat 3 orang pegawai, barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan langganan daya dan jasa PDAM sebesar Rp 828.700,00 dan PLN sebesar Rp 13.981.776,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 26.390.366.722,00 dan Rp 19.496.586.896,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.376.097.062,00 dan Rp 802.448.675,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	1.375.304.612,00	801.617.675,00	71,57
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	792.450,00	831.000,00	-4,64
Jumlah	1.376.097.062,00	802.448.675,00	71,49

Kenaikan pada pendapatan sensor/karantina, pengawasan / pemeriksaan dikarenakan meningkatnya lalu lintas komoditi pertanian.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.777.814.179,00 dan Rp 3.661.530.461,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2.147.287.800,00	2.151.814.320,00	-0,21
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.590,00	32.953,00	4,97
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	137.581.940,00	134.572.992,00	2,24
Beban Tunj. Anak PNS	45.355.334,00	44.108.216,00	2,83
Beban Tunj. Struktural PNS	43.920.000,00	44.460.000,00	-1,21
Beban Tunj. Fungsional PNS	219.745.000,00	210.475.000,00	4,40
Beban Tunj. PPh PNS	6.152.255,00	27.251.508,00	-77,42
Beban Tunj. Beras PNS	126.952.260,00	126.517.740,00	0,34
Beban Uang Makan PNS	366.845.000,00	368.104.000,00	-0,34
Beban Tunjangan Umum PNS	43.180.000,00	47.849.732,00	-9,76
Beban Uang Lembur	640.760.000,00	506.344.000,00	26,55
Jumlah	3.777.814.179,00	3.661.530.461,00	3,18

Realisasi belanja pegawai terjadi kenaikan pada tahun anggaran 2017 sebesar 3,18% dikarenakan kenaikan pembulatan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras dan uang lembur.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 288.656.905,00 dan Rp 434.432.931,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	0,00	8.473.000,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	288.656.905,00	128.951.256,00	123,85
Beban persediaan lainnya	0,00	297.008.675,00	-100,00
Jumlah	288.656.905,00	434.432.931,00	-33,56

Penurunan pada beban persediaan sebesar -33,56% dikarenakan penghematan anggaran.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.257.673.857,00 dan Rp 1.281.205.032,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Keperluan Perkantoran	440.101.867,00	543.064.599,00	-18,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	161.568.000,00	116.640.000,00	38,52
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	5.000.000,00	26.250.000,00	-80,95
Beban Bahan	101.710.000,00	128.044.000,00	-20,57
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	3.750.000,00	-100,00
Beban Langganan Listrik	189.396.436,00	177.095.344,00	6,95
Beban Langganan Telepon	8.757.036,00	11.302.821,00	-22,52
Beban Langganan Air	7.431.358,00	7.958.268,00	-6,62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	103.054.000,00		0,00
Beban Sewa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
Beban Jasa Profesi	5.400.000,00	20.100.000,00	-73,13
Beban Jasa Lainnya	49.260.000,00	60.000.000,00	-17,90
Jumlah	1.258.678.697,00	1.281.205.032,00	-1,76

Penurunan pada beban barang dan jasa sebesar -1,76% dikarenakan menurunnya belanja keperluan kantor, barang operasional lainnya, bahan, honor output kegiatan, langganan telepon, langganan air, jasa profesi dan jasa lainnya.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 658.859.000,00 dan Rp 681.520.200,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.049.000,00	204.905.000,00	-4,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	462.810.000,00	462.890.000,00	-0,02
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	600.000,00	-100,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	13.125.200,00	-100,00
Jumlah	658.859.000,00	681.520.200,00	-3,33

Penurunan pada beban pemeliharaan sebesar 3,33% dikarenakan penghematan anggaran sehingga berkurangnya aset yang akan dikenakan pemeliharaan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 761.884.381,00 dan Rp 1.584.499.200,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	291.879.404,00	189.169.000,00	54,30
Beban Perjalanan Tetap	179.755.000,00	899.260.000,00	-80,01
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	49.200.000,00	-81,71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	281.249.977,00	446.870.200,00	-37,06
Jumlah	761.884.381,00	1.584.499.200,00	-51,92

Penurunan pada beban perjalanan dinas sebesar -51,92% karena penghematan anggaran.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 798.849.457,00 dan Rp 798.849.457,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	477.941.824,00	472.502.570,00	1,15
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	307.877.434,00	279.724.882,00	10,06
Beban Penyusutan Irigasi	3.601.620,00	3.683.916,00	-2,23
Beban Penyusutan Jaringan	43.945.358,00	42.938.089,00	2,35
Jumlah	833.366.236,00	798.849.457,00	4,32

Kenaikan pada beban penyusutan dan amortisasi sebesar 4,32% karena ada Revaluasi aset tetap dari KPKNL Padang.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-1.825.665.050,00	-100,00
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0,00	4.068.250,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.624.167,00	60.413.575,00	-97,31
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.170.786,00	-108.180.930,00	-101,08
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	-2.178.750,00	-100,00
Jumlah	2.794.953,00	-1.871.542.905,00	-100,15

Penurunan pada pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar -100,15% karena menurunnya transaksi beban kerugian pelepasan aset, pendapatan pelunasan piutang non bendahara, pendapatan penyesuaian nilai persediaan, beban penyesuaian nilai persediaan dan Kerugian persediaan rusak/usang.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 19.496.586.896,00 dan Rp 20.505.612.145,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp -6.202.708.955,00 dan Rp -9.511.131.511,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 3.665.742.282,00 dan Rp -142.441.491,00. Transaksi ini berasal dari selisih revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

E.4.1 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.665.742.282,00 dan Rp 0,00. Transaksi ini berasal dari transaksi revaluasi aset tetap.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp -142.441.491,00. Transaksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 9.430.746.499,00 dan Rp 8.644.547.753,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.239.051.750,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.382.302.101,00
Transfer Masuk	18.364.750,00
Pengesahan Hibah Langsung	3.555.632.100,00
Jumlah	9.430.746.499,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 26.390.366.722,00 dan Rp 19.496.586.896,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada neraca ada aset lainnya yang merupakan aset tetap yang diberhentikan kegunaannya dikarenakan rusak berat dan akan dilakukan penghapusan pada tahun 2018.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Hasil E Rekon ada jurnal tidak lazim di aplikasi SAIBA karena untuk menghilangkan jurnal kiriman dari SIMAK BMN.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 430/Kpts/KP.230/7/2017 tertanggal 21 Juli 2017 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III, Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksana (Eselon V) Dilingkungan Badan Karantina Pertanian sehingga terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Joni Anwar, M.MA

Pejabat Pembuat Komitmen : Edriati, S.Tp

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Ahmad Yusuf, SH. MM

Bendahara Pengeluaran : Susri Yenti, SE. MM